BAB IV

ANALISIS KERJA PRAKTEK LAPANGAN

4.1 Konsep Pelayanan Terpadu Satu Atap

Instrumen perizinan didasarkan pada undang-undang gangguan atau Hinder Ordonantie (HO). Ketentuan HO merupakan larangan mendirikan tempat usaha tanpa terlebih dahulu memperoleh izin. HO (Ordonansi Gangguan) memberi dasar hukum bagi walikota/bupati untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai berikut :

a) Pengenaan persyaratan baru dalam izin setelah pemegang izin didengar dengan seksama masalah-masalah yang dihadapinya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan.

b) Memberikan perintah untuk memperbaiki kelalaian/pelanggaran dalam waktu yang ditetapkan apabila pengenaan persyaratan baru ternyata tidak berhasil mengatasi pelanggaran

c) Mencabut izin apabila tindakan a dan b tidak memadai dalam merespon pelanggaran yang terjadi.

d) Menerapkan Paksaan Pemerintah melalui upaya pencegahan agar pendirian kegiatan tanpa izin tidak terjadi.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Penegakan hukum secara administratif sangat berkaitan dengan Prosedur Perizinan, karena pemberian sanksi administratif terdiri dari pencabutan izin operasi dan penghentian izin yang bersifat sementara. Salah satu komponen penting untuk mendapat izin menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dengannya diharapkan semua kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan akan dapat diantisipasi, karena akan dapat diketahui secara lebih terperinci dampak positif dan negatif yang akan timbul dari suatu kegiatan usaha sehingga sejak dini dapat dipastikan langkah langkah untuk menanggulanginya.

Dalam hukum positif Indonesia pada saat ini konsideran Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

hubungan antarsusunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

Dalam kaitannya dengan pelayanan umum pada masyarakat sebagai salah satu kewajiban dan tanggung jawab urusan wajib pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota.19 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 34 Tahun 2004 mengatur Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi :

a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;

b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah,dan

c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.Hubungan dalam bidang pelayanan umum antarpemerintahan daerah meliputi:

A. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

B. kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan

C. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Pelayanan tersebut dimaksudkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.21 lebih jauh Inpres tersebut menyatakan hal-hal antara lain:

1) Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi,

2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

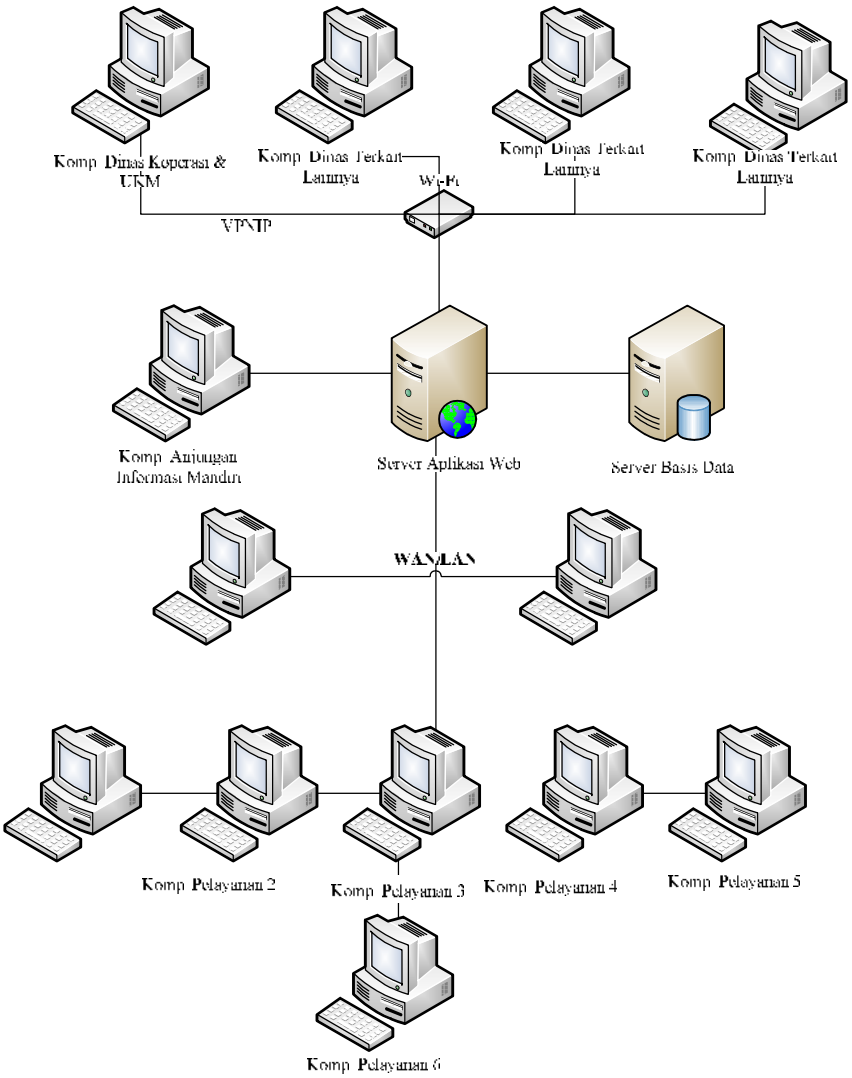
Disatu sisi peningkatan kebijakan investasi akan memberikan keuntungan dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi PAD, namun terkadang kegiatan usaha atau pemanfaatan sumber daya alam memberikan dampak yang kurang baik dan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup Indonesia

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

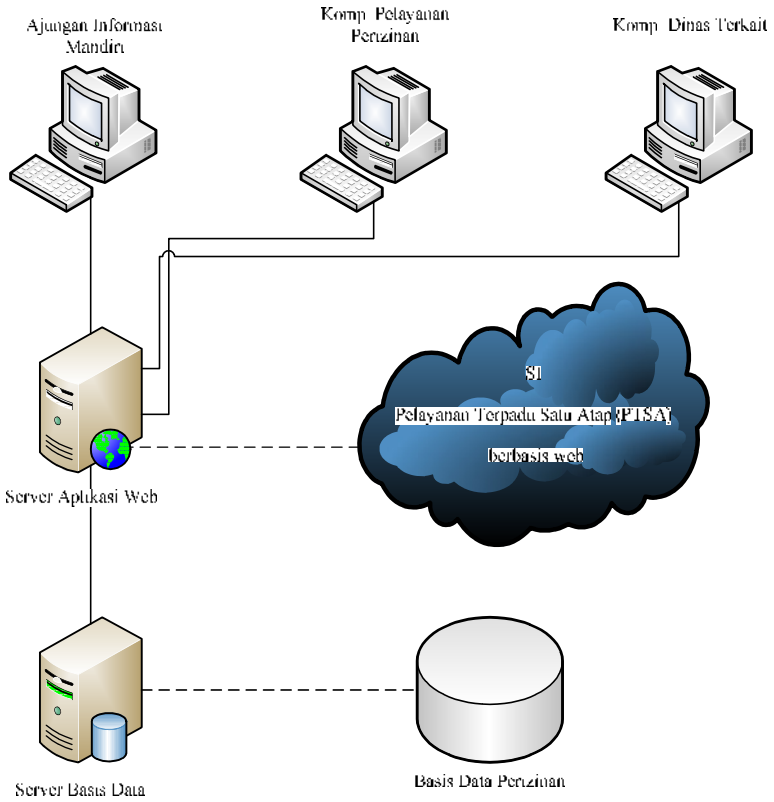
a) Arsitektur Sistem



Gambar 1.1 Arsitektur Jaringan Sistem Informasi PTSA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

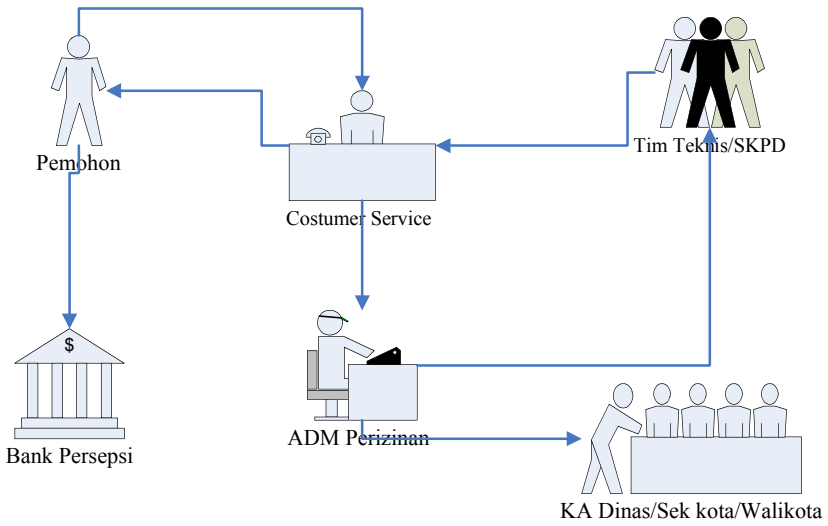
b) Arsitektur Basis Data PTSA



Gambar 1.2 Arsitektur Basis Data PTSA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kantor Pelayanan Publik



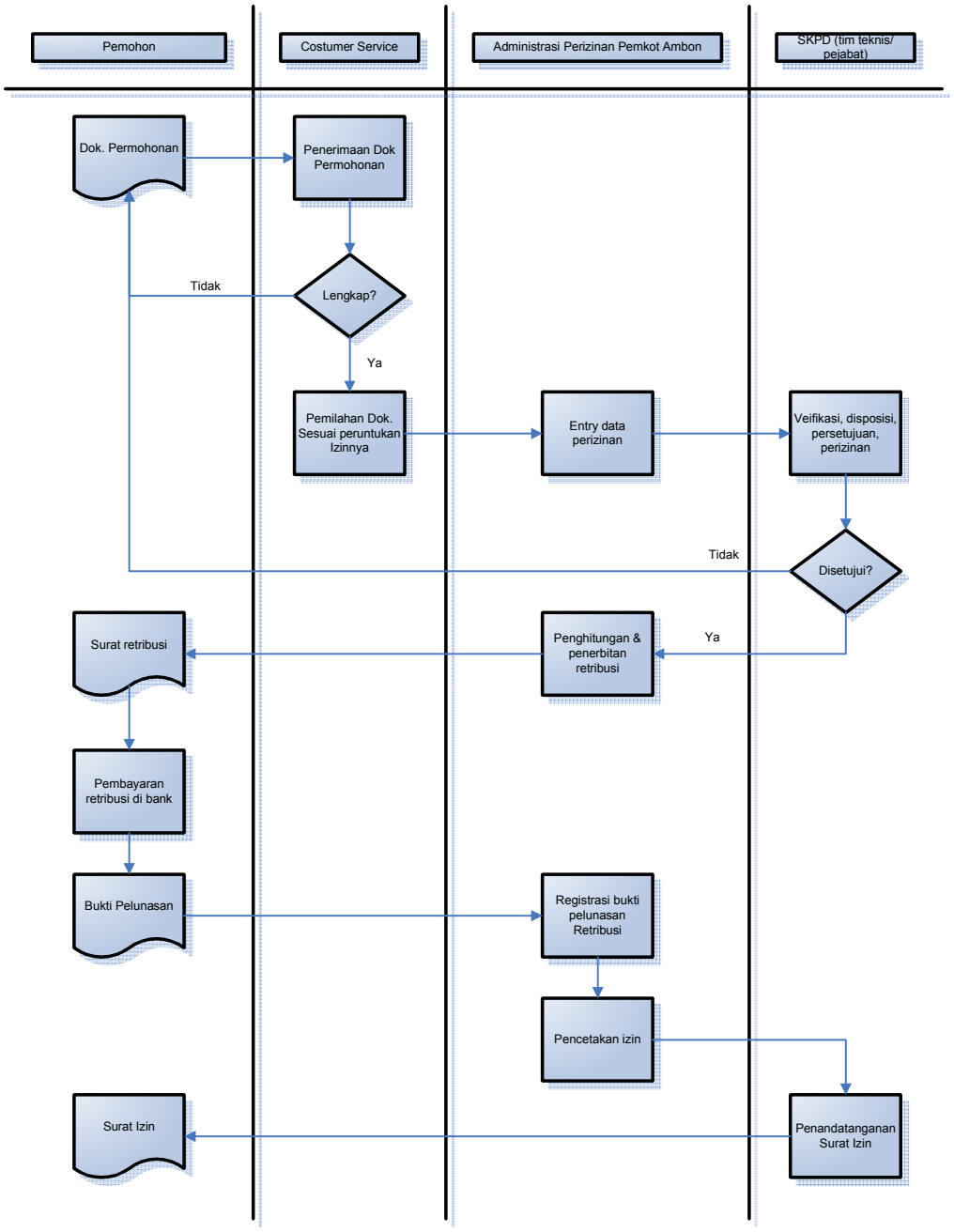
Gambar 1.4 Konsep Pelayanan Terpadu Satu Atap

Keterangan Gambar:

1. Pengajuan permohonan
2. Penerimaan Dokumen Permohonan & Layanan Konsultasi (CS)
3. Perekaman & verifikasi berkas (Administrasi Perizinan)
4. Proses teknis & persetujuan
5. Penerbitan Surat Perintah Bayar
6. Pembayaran Retribusi
7. Perekaman Pelunasan & percetakan Izin.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

8. Penandatanganan Surat Izin.



Gambar 1.5 Alur Proses Bisnis SIMANTAP

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan yang diinginkan ke Pemerintah Kota Ambon (Kantor Pelayanan Publik) dengan membawa persyaratan yang telah dilengkapi

2. Dokumen permohonan diterima oleh bagian Costumer Service untuk diteliti kelengkapan persyaratannya. Jika tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan lengkap, dokumen diterima dan diberi nomor agenda lalu data permohonan direkam pada sistem aplikasi. Selanjutnya bagian penerima dokumen(pendok) melakukan pemilahan & pendistribusian dokumen sesuai peruntukan perizinannya, dokumen diserahkan ke bagian administrasi perizinan untuk dilakukan verifikasi & entry data lebih detail

3. Bagian administrasi perizinan selanjutnya merekam data-data pada sistem aplikasi untuk izin dimaksud, setelah selesai entry data awal, proses selanjutnya adalah dilakukan verifikasi dan persetujuan permohonan izin tersebut oleh tim teknis SKPD terkait. Jika tidak disetujui maka hasil verifikasi dan persetujuan permohonan diserahkan kembali ke pemohon, jika diterima maka maka hasil verifikasi akan diserahkan kepada bagian administrasi untuk dilakukan penghitungan biaya retribusi.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. Selanjutnya bagian entry data menerbitkan perhitungan retribusi yang akan dikenakan & diserahkan ke pemohon untuk dibayarkan di Bank/ Bendahara penerima.

5. Setelah pemohon membayarkan retribusi, bukti pelunasan diserahkan ke bagian costumer service(CS) untuk diteruskan ke bagian administrasi perizinan untuk dilakukan registrasi bukti lunas.

6. Selanjutnya bagian administrasi akan mencetak & menyerahkan dokumen surat izin ke CS, setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

7. CS kemudian menyerahkan surat izin dimaksud kepada pemohon.

a Desain Tata Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap, pengadaan perangkat keras:

1. Merancang layout ruangan pelayanan terpadu satu atap di gedung A sesuai mekanisme sistem pelayanan publik pemkot ambon.

2. Menyediakan perangkat keras berupa:

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

a 8 unit PC desktop

b 8 unit stabilizer: motorized 500 watt

c 1 paket anjungan informasi mandiri

d 6 unit printer double folio

e Perlengkapan jaringan LAN

3. Melakukan pelatihan & pendampingan dalam rangka troubleshooting & alih pengetahuan (transfer knowledge) selama masa deployment.

1 Ruang lingkup pekerjaan

Unit perizinan	Jumlah izin
Dinas Pariwisata	5
Dinas perindistrian	13
Bagian Perekonomian	
Dinas perhubungan	14
Dinas Kelautan & Perikanan	12
Dinas Pertanian, Kehutanan & Peternakan	
Dinas Kesehatan	
Dinas Pekerjaan Umum	6
Dinas Tata Kota	
BAPPEKOT	

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kantor Pemadam Kebakaran	
Dinas Koperasi & UKM	16
Dinas Tenaga Kerja	
Dinas Pendapatan	2
Integrasi Sistem di KPDE	

Tabel 1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan SIMANTAP

Dibawah ini adalah beberapa usulan dalam sistem informasi manajemen pelayanan terpadu satu atap pada 5 SKPD di Pemerintah Kota Ambon, yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Kota dan Dinas Kesehatan:

1 Dinas Kelautan dan Perikanan:

a. Perekaman Data Izin Usaha

b. Perekaman Data Izin Kapal

c. Perekaman dan Penghitungan Data Retribusi

d. Pencetakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

e. Pencetakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

f. Surat Izin Retribusi

2 Dinas Pariwisata:

a. Perekaman Data SK Izin Pariwisata

b. Perekaman Data Perhitungan Data Retribusi

c. Registrasi Bukti Penerimaan Retribusi

d. Pencetakan SK Izin Pariwisata

e. Pencetakan Surat Retribusi

f. Pencetakan Tanda Terima Pelunasan Retribusi

3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

a. Perekaman Data SITU / SIUP / TDP / TDG / TDI / IUI

b. Registrasi Bukti Penghitungan Retribusi

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

c. Perekaman dan Penghitungan Retribusi

d. Pencetakan SITU / SIUP / TDP / TDG / TDI / IUI

e. Pencetakan Surat Retribusi

f. Pencetakan Tanda Terima Pelunasan Retribusi

4 Dinas Tata Kota:

a. Perekaman Data Izin Mendirikan Bangunan/Merobohkan Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan

b. Perekaman dan Perhitungan Biaya Retribusi IMB

c. Registrasi Bukti Pembayaran Retribusi

d. Pencetakan SK Izin

e. Pencetakan Tanda Terima Pelunasan Retribusi

f. Pencetakan Surat Retribusi

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5 Dinas Kesehatan:

a. Perekaman Data Izin Apotik/Toko Obat

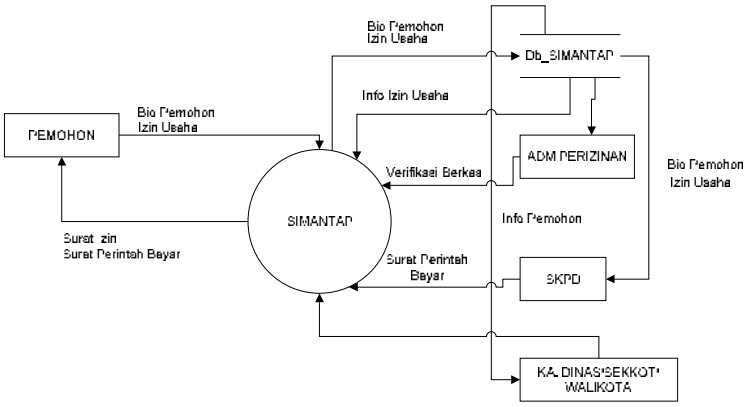
b. Perekaman Data Izin Dokter/Dokter Gigi/Bidan

c. Perekaman Data Tenaga Apoteker/Asisten Apoteker

d. Perekaman Data Rumah Sakit/Klinik

e. Perekaman Data Pengobatan Tradisional

I. Diagram Konteks



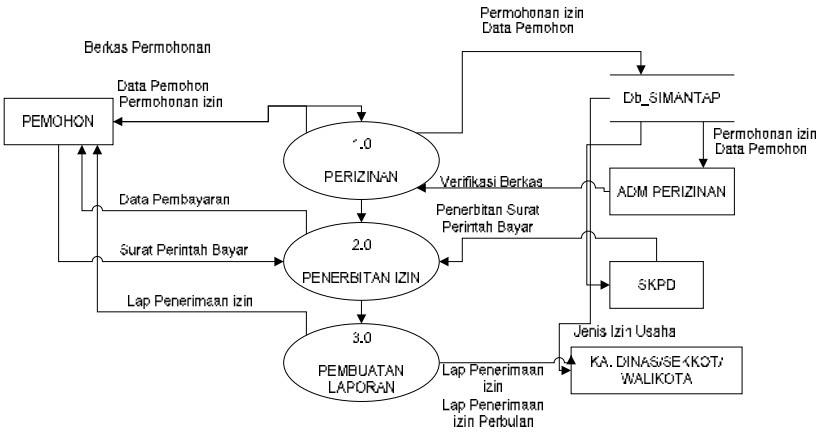
Gambar 2.0

Diagram Konteks Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Satu Atap.

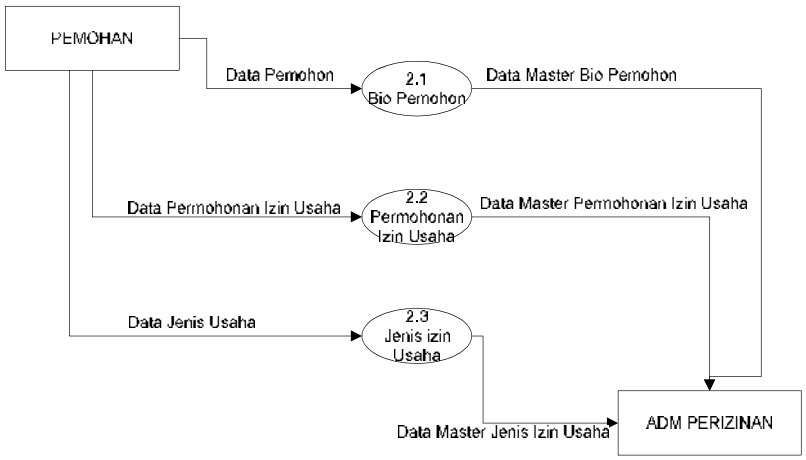
created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Data Flow Diagram (DFD) Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Atap (SIMANTAP)

II. Data Flow Diagram (DFD)



Gambar 2.1 Data Flow Diagram Level 0



Gambar 2.2 Data Flow Diagram Level 1 Proses 2

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional